PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM ATENSI OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK

Fernanda Ezra Afiawan
NPP. 33.0543
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: ezraafrnd17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Abdurohim, S. Sos, M. Si
Email: abdurohim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Empowerment programs are implemented to enhance the social and economic independence of persons with disabilities. However, persons with disabilities continue to face various barriers in achieving such independence despite the government's efforts to develop and implement various empowerment programs. In Trenggalek Regency, which had 6,340 persons with disabilities in 2025, the Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) has been implemented since 2021. Nevertheless, the effectiveness of this program in improving the independence of persons with disabilities still requires further examination.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the empowerment process of persons with disabilities through the Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) in Trenggalek Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with a post-positivist paradigm. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. The study applied the empowerment theory of Wrihatnolo and Dwidjowijoto (2007), which consists of three dimensions: awareness building, capacity building, and empowerment.* ***Result:*** *The results indicate that the empowerment of persons with disabilities through the ATENSI Program in Trenggalek Regency has been implemented fairly well. In the awareness-building stage, the government and social facilitators successfully enhanced the awareness and self-confidence of persons with disabilities through socialization activities and intensive assistance. In the capacity-building stage, beneficiaries received vocational training, productive business assistance, and continuous mentoring that improved their skills and economic independence. In the empowerment stage, the local government facilitated the establishment of inclusive communities, marketing access, and strengthened social networks that supported business sustainability and social participation among persons with disabilities.* ***Conclusion:*** *The study concludes that the ATENSI Program has succeeded in improving the economic independence of persons with disabilities and transforming their social status from aid recipients into productive economic actors. However, continuous improvement is still needed, particularly in mentoring services and regional accessibility.*

Keywords: *ATENSI Program, Disability Empowerment, Persons with Disabilities, Social Rehabilitation, Trenggalek Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Program pemberdayaan diselenggarakan untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mewujudkan kemandirian sosial dan ekonomi meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan. Di Kabupaten Trenggalek yang memiliki 6.340 penyandang disabilitas pada tahun 2025, Program ATENSI telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Namun, efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas masih perlu dikaji lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ATENSI di Kabupaten Trenggalek. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivistik*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang terdiri atas dimensi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik. Pada tahap penyadaran, pemerintah dan pendamping sosial berhasil meningkatkan kesadaran serta kepercayaan diri penyandang disabilitas melalui sosialisasi dan pendampingan intensif. Pada tahap pengkapasitasan, penerima manfaat memperoleh pelatihan vokasional, bantuan usaha produktif, dan pendampingan berkelanjutan yang mampu meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi. Pada tahap pendayaan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan komunitas inklusi, akses pemasaran, serta penguatan jejaring sosial yang mendukung keberlanjutan usaha dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. **Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa Program ATENSI berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan menggeser status sosial penyandang disabilitas dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif, meskipun masih diperlukan penguatan berkelanjutan dalam aspek pendampingan dan aksesibilitas wilayah.

Kata Kunci: Kabupaten Trenggalek, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, Program ATENSI, Rehabilitasi Sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan (Labolo, 2017). Fungsi pemberdayaan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu keluar dari kondisi ketidakberdayaan dan mencapai kemandirian (Rasyid, 2000). Dalam konteks pembangunan sosial, fungsi pemberdayaan menjadi instrumen penting untuk

meningkatkan kapasitas kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Bobsin et al., 2023). Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan, akses, dan kesempatan yang memungkinkan individu mengelola kehidupannya secara mandiri (Chaudhry, 2019).

Perubahan paradigma pembangunan sosial telah mendorong pergeseran cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Jika sebelumnya penyandang disabilitas lebih sering diposisikan sebagai objek bantuan sosial melalui pendekatan karitatif, saat ini pendekatan berbasis hak asasi manusia menempatkan mereka sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Chumo et al., 2023). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Regulasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 yang menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, realitas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses hak-haknya. Diskriminasi sosial, stigma masyarakat, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, serta minimnya fasilitas pendukung masih menjadi permasalahan yang dihadapi kelompok ini. Erissa dan Widinarsih (2022) menemukan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan formal masih rendah akibat adanya prasangka dari pemberi kerja serta keterbatasan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar penyandang disabilitas mengalami ketergantungan ekonomi dan memiliki risiko lebih tinggi untuk berada dalam kondisi kemiskinan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang relatif besar di Indonesia. Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa atau 8,5 persen dari total penduduk. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa isu disabilitas bukan lagi persoalan kelompok kecil, melainkan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan program yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai model pelayanan sosial yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Program ATENSI dirancang untuk menggabungkan rehabilitasi sosial dengan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai bentuk layanan yang mencakup dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan kapasitas individu, pelatihan keterampilan, bantuan kewirausahaan, pendampingan keluarga, serta penguatan dukungan komunitas. Melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, program ini

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus kemandirian penyandang disabilitas secara berkelanjutan (Ebrahim et al., 2022).

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 menunjukkan bahwa Jawa Timur berada pada urutan kedua sebagai provinsi dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur sangat tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas serta berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas yang dilaksanakan di sejumlah daerah.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki jumlah penyandang disabilitas cukup besar dan tersebar di seluruh kecamatan. Berikut disajikan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Trenggalek	359	374	733
Pogalan	217	196	413
Durenan	288	217	505
Watulimo	270	180	450
Munjungan	224	174	398
Kampak	189	189	378
Gandusari	284	208	492
Karangan	218	196	414
Suruh	164	150	314
Dongko	242	184	426
Pule	140	143	283
Panggul	478	403	881
Tugu	226	183	409
Bendungan	131	113	244

Sumber: Satu Data Kabupaten Trenggalek, 2025

Berdasarkan data Satu Data Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 6.340 jiwa. Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi yaitu sebanyak 881 jiwa, sementara itu Kecamatan Bendungan menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas terendah yakni 244 jiwa. Sebaran jumlah penyandang disabilitas yang relatif merata di seluruh wilayah menunjukkan bahwa isu pemberdayaan disabilitas merupakan kebutuhan nyata yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, seperti Layanan Disabilitas untuk Fasilitasi Edukasi dan Stimulasi Terintegrasi (LADIS FEST) serta Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). Namun, sebagian besar program tersebut masih berorientasi pada pelayanan dasar, fasilitasi sosial, dan bantuan kesejahteraan. Sementara itu, Program ATENSI memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga mengintegrasikan aspek rehabilitasi sosial, pengembangan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mendorong kemandirian penerima manfaat. Implementasi Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek telah berlangsung sejak tahun 2021 dan masih terus berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan ATENSI senilai lebih dari Rp957 juta kepada ratusan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Trenggalek, termasuk penyandang disabilitas. Bantuan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan nutrisi, alat bantu, serta bantuan kewirausahaan. Besarnya alokasi bantuan menunjukkan bahwa Program ATENSI menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Trenggalek menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI. Besarnya jumlah penyandang disabilitas, keberlangsungan implementasi program sejak tahun 2021, serta pentingnya meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Secara empiris, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, mulai dari perlindungan hak, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi kelompok rentan yang menghadapi

keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi produktif. Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari total penduduk. Besarnya jumlah tersebut belum diimbangi dengan kesempatan yang setara dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga pemberdayaan menjadi agenda penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Satu Data Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas mencapai 6.340 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Kecamatan Panggul memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi yaitu 881 jiwa, disusul Kecamatan Trenggalek sebanyak 733 jiwa dan Kecamatan Durenan sebanyak 505 jiwa. Sebaran jumlah penyandang disabilitas yang relatif merata menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program pemberdayaan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, melainkan menjadi kebutuhan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti LADIS FEST dan GERTAK, program-program tersebut masih lebih banyak berorientasi pada pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan. Sementara itu, Program ATENSI hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan rehabilitasi sosial, pengembangan keterampilan, bantuan kewirausahaan, pendampingan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem layanan.

Hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan adanya pola permasalahan yang relatif serupa dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu tersebut umumnya mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas dari aspek implementasi program, pelatihan keterampilan, rehabilitasi berbasis masyarakat, strategi kelembagaan, atau pemberdayaan komunitas secara terpisah. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Sukabumi, Banyuwangi, Buleleng, dan Jombang yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda dengan Kabupaten Trenggalek. Penelitian mengenai Program ATENSI juga masih lebih banyak menyoroti keberhasilan maupun hambatan implementasi program, sementara kajian yang secara khusus menganalisis ATENSI sebagai instrumen pemberdayaan yang mengintegrasikan rehabilitasi sosial, penguatan kapasitas individu, dukungan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI pada tingkat pemerintah daerah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas cukup besar dan tersebar secara luas seperti Kabupaten Trenggalek. Kesenjangan ini semakin penting mengingat Program ATENSI telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan pada tahun 2025 memperoleh dukungan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai lebih dari Rp957 juta bagi ratusan penerima manfaat di Kabupaten Trenggalek. Besarnya jumlah penyandang disabilitas, keberlanjutan pelaksanaan program, serta besarnya alokasi bantuan menunjukkan bahwa Program ATENSI memiliki posisi strategis dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah. Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana program tersebut dilaksanakan, sejauh mana mampu meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, serta faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kabupaten Trenggalek memiliki urgensi yang tinggi karena penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan untuk hidup mandiri. Di sisi lain, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek tergolong cukup besar dan tersebar di seluruh kecamatan, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian penerima manfaat. Program ATENSI hadir sebagai salah satu instrumen kebijakan yang mengintegrasikan rehabilitasi sosial, pengembangan keterampilan, dukungan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mampu menjalankan fungsi pemberdayaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

Selain memiliki urgensi praktis, penelitian ini juga penting secara akademis karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan Program ATENSI sebagai model pemberdayaan penyandang disabilitas yang komprehensif pada tingkat pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pelatihan vokasional, rehabilitasi sosial, strategi kelembagaan, atau pemberdayaan berbasis komunitas secara terpisah. Padahal, Program ATENSI menggabungkan berbagai aspek tersebut dalam satu kerangka pelayanan yang terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian pemberdayaan kelompok rentan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas dan implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi sosial penerima manfaat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sumber daya, dukungan kelembagaan, koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program pemberdayaan.

Penelitian Alfatih dan Rahayu (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan cukup baik, khususnya dalam peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas rungu. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan program didukung oleh

adanya kolaborasi berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek fasilitas dan keterbatasan anggaran yang memengaruhi optimalisasi program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh dukungan sumber daya dan sinergi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya, penelitian Maharani et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi Program ATENSI bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama ditemukan pada aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi program. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta minimnya dukungan anggaran menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan program. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas implementasi program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana dan kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan kepada kelompok sasaran.

Penelitian Novaria et al. (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Kampung Inklusi di Kabupaten Banyuwangi berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif melalui pendekatan berbasis komunitas. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penggerak utama kegiatan pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan penguatan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan kemandirian dan keberlanjutan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Terakhir, penelitian Tukiman et al. (2021) menunjukkan bahwa Program KAREPE DIMESEMI BOJO di Kabupaten Jombang berhasil memberdayakan penyandang disabilitas mental melalui pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat. Program tersebut dinilai efektif dalam mengurangi praktik pasung, menekan stigma sosial, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa dukungan keluarga masih menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan karena tingkat partisipasi dan pendampingan keluarga cenderung berbeda-beda pada setiap penerima manfaat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan analisis terhadap empat penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas masih didominasi oleh pembahasan implementasi Program ATENSI (Alfatih & Rahayu, 2024; Maharani et al., 2023), pemberdayaan berbasis komunitas (Novaria et al., 2023), serta rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas mental (Tukiman et al., 2021). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek implementasi program, pelatihan keterampilan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan komunitas sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Kebaruan ilmiah penelitian ini diperoleh melalui analisis komparatif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pemberdayaan penyandang disabilitas dan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Kebaruan tersebut dianalisis berdasarkan aspek teori, fokus kajian, lokus penelitian, dan karakteristik objek penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Alfatih dan Rahayu (2024) yang mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas rungu melalui Program ATENSI di Provinsi DKI Jakarta. Dari aspek teori, penelitian Alfatih dan Rahayu lebih menitikberatkan pada implementasi program pemberdayaan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang terdiri atas dimensi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dari aspek fokus kajian, penelitian terdahulu berorientasi pada peningkatan keterampilan vokasional, sedangkan penelitian ini menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas secara komprehensif melalui Program ATENSI. Dari aspek objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat provinsi dengan sasaran penyandang disabilitas rungu, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan sasaran penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Maharani et al. (2023) yang membahas implementasi Program ATENSI bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Dari aspek teori, penelitian Maharani et al. menggunakan perspektif implementasi kebijakan yang menekankan aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi program, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat. Dari aspek fokus kajian, penelitian terdahulu berfokus pada keberhasilan dan hambatan implementasi program, sementara penelitian ini menganalisis proses pemberdayaan yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dari aspek lokus penelitian, Kota Sukabumi memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda dengan Kabupaten Trenggalek yang memiliki jumlah penyandang disabilitas cukup besar dan tersebar di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Novaria et al. (2023) yang mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Kampung Inklusi di Kabupaten Banyuwangi. Dari aspek teori, penelitian Novaria et al. menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. Dari aspek kebijakan, penelitian terdahulu berfokus pada Program Kampung Inklusi yang berbasis komunitas lokal, sementara penelitian ini berfokus pada Program ATENSI sebagai kebijakan nasional yang mengintegrasikan rehabilitasi sosial, pengembangan keterampilan, dukungan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi. Dari aspek objek penelitian, penelitian terdahulu lebih menekankan peran komunitas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian Tukiman et al. (2021) yang mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas mental melalui Program KAREPE DIMESEMI BOJO di Kabupaten Jombang. Dari aspek teori, penelitian Tukiman et al. berorientasi pada rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat. Dari aspek fokus kajian, penelitian terdahulu lebih menekankan pengurangan stigma sosial dan rehabilitasi penyandang disabilitas mental, sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi penyandang disabilitas melalui Program ATENSI. Dari aspek objek penelitian, penelitian terdahulu hanya menyasar penyandang disabilitas mental,

sedangkan penelitian ini mencakup penerima manfaat Program ATENSI dari berbagai kategori disabilitas.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada empat aspek utama. Pertama, aspek teori, yaitu penggunaan teori pemberdayaan masyarakat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menekankan dimensi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan dalam menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas. Kedua, aspek fokus kajian, yaitu analisis Program ATENSI sebagai instrumen pemberdayaan yang terintegrasi, tidak hanya sebagai program rehabilitasi sosial atau bantuan sosial. Ketiga, aspek kebijakan, yaitu pengkajian keterkaitan antara rehabilitasi sosial, pengembangan kapasitas, dukungan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kerangka analisis. Keempat, aspek karakteristik objek penelitian, yaitu Kabupaten Trenggalek sebagai daerah yang memiliki 6.340 penyandang disabilitas dan telah melaksanakan Program ATENSI secara berkelanjutan sejak tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris baru mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI pada tingkat pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ATENSI di Kabupaten Trenggalek.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma *post-positivisme* untuk menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pemberdayaan, pengalaman penerima manfaat, serta dinamika pelaksanaan program dalam konteks sosial yang kompleks. Paradigma *post-positivisme* digunakan karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial secara objektif dengan tetap mengakui adanya berbagai perspektif, nilai, dan interpretasi dari para aktor yang terlibat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Nurdin & Hartati, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program ATENSI. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan, regulasi, data statistik, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan memilih pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pendamping Sosial Program ATENSI, penyandang disabilitas penerima manfaat Program ATENSI, serta Ketua Yayasan Disabilitas Naeema. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan

program, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pemberdayaan dan kondisi penerima manfaat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna meningkatkan validitas serta kredibilitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat dari Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Program ATENSI dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas terhadap potensi dirinya, mengembangkan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, serta memperluas akses dan kesempatan untuk mencapai kemandirian sosial maupun ekonomi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dengan fokus pada Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek sebagai pelaksana Program ATENSI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama 20 hari, yaitu pada tanggal 5–24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007). Teori tersebut terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Adapun pembahasan masing-masing dimensi akan disajikan sebagai berikut.

3.1. Penyadaran

Pada dimensi penyadaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas terhadap hak, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan sosial yang melibatkan Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, dan masyarakat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mengurangi stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sekaligus membangun kepercayaan diri agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pada aspek peningkatan kepercayaan terhadap hak dan potensi diri, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek memandang Program ATENSI sebagai program yang berbasis hak, bukan sekadar bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa "Program ATENSI bukan sekadar program amal, melainkan program hak asasi manusia. Kami ingin penyandang disabilitas memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam pembangunan daerah." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menanamkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek pembangunan yang memiliki kedudukan setara dengan masyarakat lainnya. Temuan ini didukung oleh dokumentasi kegiatan sosialisasi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek tahun 2025 yang melibatkan perangkat

desa, tokoh masyarakat, dan calon penerima manfaat sebagai sarana edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya penerimaan sosial terhadap kelompok disabilitas. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, 2025

Gambar 3.1

Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial

Berdasarkan gambar diatas, aspek penyadaran dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kecamatan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa "kami menggandeng perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memutus stigma negatif yang membuat penyandang disabilitas malu keluar rumah serta menyadarkan mereka akan hak dan potensinya." Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyadaran tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga kepada masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif. Keterlibatan tokoh masyarakat menjadi penting karena dapat memperkuat penerimaan sosial serta mengurangi diskriminasi yang selama ini masih dialami penyandang disabilitas.

Selanjutnya, terkait dengan adanya pendampingan sosial untuk menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran dan motivasi penerima manfaat. Pendamping sosial Program ATENSI menyampaikan bahwa "banyak penyandang disabilitas yang memiliki mental block dan merasa tidak berguna sehingga kami melakukan pendekatan door-to-door untuk memberikan motivasi dan meyakinkan bahwa keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya." Pendampingan dilakukan secara personal melalui komunikasi intensif sehingga penerima manfaat merasa didengar, dihargai, dan didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas sebelum mereka mengikuti tahapan pemberdayaan berikutnya.

Hasil wawancara dengan penerima manfaat juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir setelah mengikuti Program ATENSI. Salah satu penyandang disabilitas menyatakan bahwa "setelah mendapatkan pendampingan dan bantuan usaha, saya lebih percaya diri karena bisa bekerja dari rumah dan tidak lagi dianggap sebagai beban keluarga." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyadaran telah memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis penerima manfaat. Selain meningkatkan kepercayaan diri, penyadaran juga mendorong

munculnya keyakinan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara keseluruhan, dimensi penyadaran dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut berhasil meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas terhadap hak dan potensi diri, mengurangi stigma sosial, serta menumbuhkan rasa percaya diri untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif teori pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), temuan ini menunjukkan bahwa dimensi penyadaran telah terlaksana sebagai fondasi awal pemberdayaan, karena mampu mengubah pola pikir penerima manfaat dari kondisi tidak berdaya menuju kesadaran akan kemampuan dan kemandirian yang dimiliki.

3.2. Pengkapasitasan

Dimensi pengkapasitasan dalam Program ATENSI Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan kesadaran, tetapi dilanjutkan dengan penguatan kemampuan teknis dan ekonomi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memberikan pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan jenis disabilitas penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa "kami mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan vokasional dan bekerja sama dengan instruktur profesional agar keterampilan yang diberikan memiliki nilai jual." Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi kegiatan pelatihan kerajinan bambu, menjahit, tata boga, dan keterampilan produktif lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, 2025

Gambar 3.2

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan pelatihan diawali dengan pemetaan kebutuhan peserta agar materi yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan potensi masing-masing penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa "kami melakukan pemetaan minat dan bakat sebelum pelatihan dimulai sehingga pelatihannya benar-benar inklusif dan ramah hambatan." Selain itu, pendamping sosial menyampaikan bahwa "kami memfasilitasi kebutuhan peserta selama pelatihan, termasuk pendampingan dan antar-jemput bagi yang memiliki kendala

mobilitas.” Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menciptakan akses pelatihan yang inklusif sehingga seluruh penerima manfaat dapat mengikuti proses pengembangan kapasitas secara optimal.

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui pemberian bantuan usaha dan pendampingan berkelanjutan. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa “bantuan usaha diberikan berdasarkan proposal kebutuhan penerima manfaat dan didampingi melalui monitoring berkala.” Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi penyaluran bantuan usaha produktif berupa peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, 2025

Gambar 3.3

Pemberian Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Gambar diatas, dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek sudah memberikan modal usaha bagi penyandang disabilitas dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas. Selain bantuan fisik, Dinas Sosial juga memberikan edukasi manajemen keuangan sederhana agar modal usaha dapat dikelola secara berkelanjutan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menegaskan bahwa “edukasi keuangan penting agar modal yang diberikan tidak habis untuk kebutuhan konsumsi.” Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa “kunjungan pasca-pelatihan dilakukan secara rutin untuk memastikan bantuan digunakan dalam kegiatan produksi.” Manfaat pengkapasitasan dirasakan langsung oleh penerima program. Salah satu penyandang disabilitas penerima manfaat menyampaikan bahwa “saya diajarkan teknik menjahit baru, mendapatkan fasilitas pelatihan secara gratis, dan sekarang berani membuka jasa jahitan di rumah.” Informan lainnya menambahkan bahwa “dukungan dari pendamping membuat saya lebih percaya diri dan tidak lagi malu dengan kondisi fisik saya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri serta kesiapan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, dimensi pengkapasitasan dalam Program ATENSI telah diimplementasikan secara komprehensif melalui pelatihan vokasional, pemberian bantuan usaha produktif, edukasi manajemen keuangan, serta pendampingan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek tidak hanya meningkatkan keterampilan

penyandang disabilitas, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi dan psikologis mereka sehingga lebih mandiri. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep pengkapasitasan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menekankan pentingnya penguatan kemampuan individu agar mampu mengelola sumber daya dan memanfaatkan peluang secara mandiri.

3.3. Pendayaan

Pada dimensi pendayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ATENSI di Kabupaten Trenggalek telah diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan usaha penyandang disabilitas. Dinas Sosial tidak hanya memberikan pelatihan dan bantuan usaha, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa "kami mendorong pembentukan Kelompok Usaha Bersama disabilitas dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengikuti pameran pembangunan maupun bazar UMKM." Temuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan eksistensi penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha produktif.

Proses pendayaan juga diperkuat melalui dukungan berbagai pihak, termasuk Yayasan Disabilitas Naeema yang berperan dalam pengembangan jejaring sosial dan pemasaran produk. Ketua Yayasan Disabilitas Naeema menyampaikan bahwa "yang terpenting bukan hanya keterampilan, tetapi memastikan teman-teman disabilitas memiliki ruang untuk berkembang, berjejaring, dan menunjukkan potensinya." Pernyataan tersebut diperkuat oleh dokumentasi kegiatan Yayasan Naeema yang menunjukkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas sosial dan pengembangan kapasitas. Selain itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa "komunitas inklusi dibentuk agar mereka dapat bertukar pengalaman, berbagi solusi usaha, dan melakukan produksi secara kolektif." Kondisi ini menunjukkan bahwa pendayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan modal sosial dan solidaritas antar penyandang disabilitas.

Pendamping sosial turut berperan dalam menjaga keberlanjutan program melalui pembentukan grup komunikasi, pendampingan pemasaran, serta monitoring usaha. Pendamping sosial menyatakan bahwa "kami membantu pemasaran produk dan membangun paguyuban lokal agar mereka dapat saling mendukung." Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan dukungan lanjutan berupa monitoring, fasilitasi akses perizinan usaha, serta pendampingan pemasaran. Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa "kami tetap melakukan monitoring dan membantu akses legalitas usaha bagi penerima manfaat yang usahanya mulai berkembang." Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menambahkan bahwa pemerintah daerah berupaya memanfaatkan hasil karya penyandang disabilitas sebagai kebutuhan instansi sehingga tercipta dukungan pasar yang lebih nyata.

Dampak pendayaan dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat. Salah satu penyandang disabilitas menyampaikan bahwa "sekarang sudah ada wadah bagi kami untuk berkumpul, belajar pemasaran digital, dan saling mendukung." Informan juga mengungkapkan bahwa "masyarakat kini melihat saya sebagai pengusaha kecil, bukan lagi orang yang perlu

dikasihani." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi sekaligus perubahan pengakuan sosial yang diterima penyandang disabilitas setelah mengikuti Program ATENSI. Keberadaan komunitas dan dukungan berkelanjutan telah meningkatkan rasa percaya diri, keberanian bersosialisasi, serta kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, dimensi pendayaan dalam Program ATENSI Kabupaten Trenggalek telah diimplementasikan melalui pembentukan komunitas inklusi, penguatan jejaring sosial, dukungan pemasaran, fasilitasi legalitas usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas yang telah dibangun melalui tahap penyadaran dan pengkapasitasan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep pendayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menekankan pentingnya pemberian ruang, kesempatan, dan akses bagi masyarakat untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh peningkatan kesadaran mengenai hak dan potensi dirinya, tetapi juga mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan vokasional, bantuan usaha produktif, pendampingan sosial, serta akses terhadap komunitas inklusi yang mendukung keberlanjutan usaha dan partisipasi sosial. Meskipun demikian, keberhasilan program masih memerlukan dukungan pendampingan yang berkesinambungan, penguatan akses pasar, serta perluasan jejaring kolaborasi agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfatih dan Rahayu (2024) yang menemukan bahwa Program ATENSI di Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasional. Kesamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya pelatihan keterampilan sebagai instrumen utama pemberdayaan. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Alfatih dan Rahayu (2024) karena menunjukkan bahwa keberhasilan ATENSI tidak hanya ditentukan oleh pelatihan vokasional, tetapi juga oleh proses penyadaran dan pendayaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan sosial, pembentukan komunitas inklusi, serta dukungan akses pasar bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemberdayaan sebagai proses yang terintegrasi dari perubahan kesadaran hingga penciptaan kemandirian ekonomi.

Berbeda halnya dengan penelitian Maharani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi Program ATENSI di Kota Sukabumi belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, dan dukungan anggaran yang belum memadai. Hasil penelitian di Kabupaten Trenggalek menunjukkan kondisi yang berbeda. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek mampu

mengoptimalkan peran pendamping sosial, pemerintah desa, serta mitra kelembagaan dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Program ATENSI sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, pola koordinasi antaraktor, dan intensitas pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diminimalisasi melalui kolaborasi dan penguatan jejaring kelembagaan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung temuan Novaria et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan penguatan komunitas lokal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembentukan komunitas inklusi, kelompok usaha bersama, serta keterlibatan Yayasan Disabilitas Naeema berperan penting dalam memperkuat jejaring sosial dan keberlanjutan usaha penyandang disabilitas. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dan organisasi sosial sebagai penguat modal sosial. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Novaria et al. (2023) dengan menunjukkan bahwa komunitas tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga sebagai media pemasaran, pertukaran pengalaman usaha, dan pengembangan kapasitas ekonomi secara kolektif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tukiman et al. (2021) yang menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan keluarga. Dalam penelitian ini, proses pendampingan yang melibatkan keluarga, pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi sosial terbukti meningkatkan kepercayaan diri serta partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi juga oleh dukungan sosial yang diterima penyandang disabilitas dari lingkungan sekitarnya. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Tukiman et al. (2021) karena menunjukkan bahwa dukungan sosial tersebut tidak hanya berfungsi pada tahap rehabilitasi, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan pengakuan sosial terhadap penyandang disabilitas sebagai individu yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program ATENSI tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan sosial atau pelatihan keterampilan semata, tetapi oleh keterpaduan antara proses penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk kemampuan, kepercayaan diri, serta akses yang memungkinkan penyandang disabilitas mencapai kemandirian. Temuan ini memperkuat teori pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menempatkan pemberdayaan sebagai proses bertahap yang dimulai dari perubahan kesadaran, peningkatan kapasitas, hingga pemberian ruang dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki.

Kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui perspektif Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) secara lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pelatihan

keterampilan, implementasi program, atau penguatan komunitas secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan merupakan hasil dari keterkaitan antara proses penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan yang berlangsung secara berkesinambungan. Temuan ini memperkaya kajian pemberdayaan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan Program ATENSI tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan atau pelatihan semata, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan diri, meningkatkan kapasitas, serta menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kabupaten Trenggalek berdasarkan teori pemberdayaan Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) telah berjalan dengan cukup baik. Implementasi program menunjukkan bahwa proses pemberdayaan berhasil meningkatkan kesadaran, kapasitas, serta kemandirian penyandang disabilitas melalui berbagai bentuk pendampingan, pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan penguatan jejaring sosial. Program ini juga mampu mendorong perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan berwirausaha, serta partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah, pendamping sosial, keluarga, dan komunitas menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Namun demikian, pelaksanaan Program ATENSI masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada aspek keberlanjutan pendampingan, perluasan akses pasar bagi produk usaha penyandang disabilitas, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program melalui peningkatan kemitraan, pengembangan pemasaran digital, perluasan akses permodalan dan kesempatan kerja, serta monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan inklusi sosial yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan waktu penelitian yang terbatas, sehingga belum seluruh aspek pelaksanaan Program ATENSI serta pengalaman seluruh penerima manfaat dapat dikaji secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji keberlanjutan dampak Program ATENSI dalam jangka panjang, khususnya terhadap kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan inklusi sosial penyandang disabilitas, serta melibatkan cakupan informan dan wilayah penelitian yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfatih, S. R., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis pemberdayaan disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Journal of Governance and Policy, 5*(1), 1–20. https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.005.01.1

Bobsin, T. S., Camilo, S. P. O., & Cardoso, L. (2023). Supported employment as a driver for the social inclusion of people with disabilities in the labor market. *WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 76*(1), 289–301. https://doi.org/10.3233/WOR-220563

Chaudhry, V. (2019). Neoliberal crises of social work in the Global South: Ethnography of individualizing disability and empowerment practice in India. *International Social Work, 62*(3), 1047–1060. https://doi.org/10.1177/0020872818767501

Chumo, I., Kabaria, C., & Mberu, B. (2023). Social inclusion of persons with disability in employment: What would it take to socially support employed persons with disability in the labor market? *Frontiers in Rehabilitation Sciences, 4*, 1125129. https://doi.org/10.3389/fresc.2023.1125129

Ebrahim, A., Lorenzo, T., & Kathard, H. (2022). Traversing disability: Building social capital through skill development for employment. *Disabilities, 2*(3), 439–450. https://doi.org/10.3390/disabilities2030031

Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan: Kajian literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia, 3*(1), 1-17. https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027

Labolo, M. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Rajawali Pers.

Maharani, S., Purwanti, D., & Basori, Y. F. (2023). Implementasi program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 12*(2), 392–402. https://doi.org/10.32663/5sb3ys32

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Novaria, L., Utama, Y. H. C., & Pujileksono, S. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1*(2). 19-31. https://journalng.uwks.ac.id/berdaya/article/view/52

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif*. Alfabeta.

Tukiman, Lestari, T. P., Rahayu, E. P., & Laili, R. A. N. (2021). Pemberdayaan disabilitas mental melalui program Karepe Dimesemi Bojo di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation, 2*(5), 734–748. https://www.mendeley.com/catalogue/36cd3020-cf2e-3e40-8ca5-4d5d3af91ae1/

Wrihatnolo, R. R., & Nugroho, R. (2007). *Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.